

ANALISIS *KLASSEN TYPOLOGY* SEKTOR EKONOMI PROVINSI RIAU

Fajar Dwi Putra¹, Fahmi W. Kifli², Arum Ambarsari²

¹Mahasiswa Fakultas Pertanian INSTIPER

²Dosen Fakultas Pertanian INSTIPER

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk :1. Mengetahui kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau, 2. Mengetahui kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB di Indonesia,3. Mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau,4. Mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDB di Indonesia, 5. Mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif.,dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu atau *time series* selama 15 tahun dari tahun 1999-2013. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Penelitian Kepustakaan, yaitu data-data yang didapatkan dari berbagai buku, dokumen, artikel ilmiah maupun pengutipan berbagai teori yang relevan dilakukan dengan banyak telaah untuk memperkuat landasan teori serta menyusun konsep penelitian dan Pencatatan data berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan anatar lain :Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan menggunakan metode analisis *klassen typology*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi Propinsi Riau.2.Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB nasional berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia.3.Pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang positif.4. Pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDB nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif.5. Pola dan struktur ekonomi di Provinsi Riau berdasarkan *Klassen Typology* diketahui bahwa kategori sektor maju dan tumbuh cepat ada 1 (satu), yaitu Sektor Pertanian. Kategori sektor sedang tumbuh ada 6 (enam), yaitu Sektor Industri dan Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-jasa. Kategori sektor maju tetapi tertekan ada 1 (satu), yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian. Kategori sektor relatif tertinggal ada 1 (satu), yaitu Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Kata kunci : Analisis *Klassen Typology*, PDRB, PDB.

PENDAHULUAN

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh sebab itu sangat diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah relatif tinggi. Pertumbuhan suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga di wilayah lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Seperti diketahui bersama, krisis yang melanda Indonesia sejak periode 1997, membawa dampak negatif ke dunia perekonomian nasional umumnya, dan perekonomian regional khususnya. Krisis ini menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor yang ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang, yaitu Undang-undang. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbang : a). Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang

Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; b). Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah yang menimbang : a). Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; b). Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

Lahirnya undang-undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, baik

dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sektor produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha, yaitu : Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-jasa.

Sektor lapangan usaha tersebut akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan dan akan memberikan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi serta pertumbuhan investasi sehingga menyebabkan perluasan lapangan kerja. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi

pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005). Pengaruh pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Riau perlu dikaji lebih lanjut dan juga keterkaitannya dengan sektor lain. Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Riau diupayakan dengan optimalisasi sumberdaya yang ada melalui sektor-sektor yang mendukung pembangunan daerah. Kemudian diupayakan arah pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara terarah dan terpadu yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Dasar Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut (Nazir, 1998) bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode yang menganalisis atau meneliti status kelompok manusia, suatu objek yang terkondisi dan suatu sistem atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Pada masalah-masalah aktual kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (Surakhmad, 2001). Penelitian ini diarahkan pada tentang analisis sektor ekonomi di Provinsi Riau.

Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Metode penentuan lokasi pada penelitian ini adalah Studi Kasus sektor ekonomi di Provinsi Riau. Nazir (1988) mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu atau *time series* selama 15 tahun dari tahun 1999-2013 yang terdiri dari 2 (dua) kelompok data, yaitu :

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau Tahun 1999-2013 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000.
2. Data Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Tahun 1999-2013 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.
3. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau.
4. Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
7. Bank Indonesia Provinsi Riau.

Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu data-data yang didapatkan dari berbagai buku, dokumen, artikel ilmiah maupun pengutipan berbagai teori yang relevan dilakukan dengan banyak telaah untuk memperkuat landasan teori serta menyusun konsep penelitian.
2. Pencatatan data berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan anatar lain : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Konseptualisasi dan Pengukuran Variabel

a. Laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi daerah berarti besar kecilnya persentase peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor produksi suatu daerah bisa juga dapat diartikan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih

besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen per tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

b. Pertumbuhan sektor ekonomi

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam persentase.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun).

d. Sektor-sektor ekonomi

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

Metode Analisis Data

a. Analisis *Klassen Typology*

Perkembangan perekonomian regional dapat dilihat dari pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan analisis *Klassen Typology*. Karakteristik pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi

dan pendapatan masing-masing sektor ekonomi.

Sjahfrizal (1997) menyatakan rumus untuk menganalisa *Klassen Typology* :

$$R_i = \left(\frac{V_{it} - V_{io}}{V_{io}} \right) \times 100 \%$$

..... (3.1)

$$r = \left(\frac{V_i - V_o}{V_o} \right) \times 100 \%$$

..... (3.2)

keterangan :

V_{it} = PDRB sektor i Provinsi Riau pada Akhir Tahun Penelitian

V_{io} = PDRB sektor i Provinsi Riau pada Awal Tahun Penelitian

V_i = PDRB Nasional sektor i pada Akhir Tahun Penelitian

V_o = PDRB Nasional sektor i pada Awal Tahun Penelitian

Hasil analisis tersebut dapat menjelaskan karakteristik pertumbuhan Provinsi Riau. Analisis *Klassen Typology* digunakan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi.

Karakteristik pertumbuhan daerah terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Daerah maju dan tumbuh cepat (*Rapid Growth Region*)
2. Daerah maju tetapi tertekan (*Retarde Region*)
3. Daerah sedang bertumbuh (*Growing Region*)
4. Daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*)

Tabel 3.1 Klasifikasi pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Sektoral menurut *Klassen Typology*

Kontribusi Sektor Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
	Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (<i>Rapid Growth Region</i>)	Daerah Sedang Tumbuh (<i>Growing Region</i>)
$R_i > r$	Daerah Maju Tetapi Tertekan (<i>Retarde Region</i>)	Daerah Relatif Tertinggal (<i>Relatively Backward Region</i>)
$R_i < r$		

Sumber : Sjafrizal (1997)

Keterangan :

R_i = Rata-rata presentase pertumbuhan PDRB sektor i di Provinsi Riau

r = Rata-rata presentase pertumbuhan PDB sektor i Nasional

Y_i = Rata-rata kontribusi sektor i di Provinsi Riau

Y = Rata-rata kontribusi sektor i di tingkat Nasional

Dari matriks di atas, maka dapat diketahui Propinsi Riau terletak pada posisi mana, makadapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bila $R_i > r$ dan $Y_i > Y$ maka Provinsi Riau merupakan daerah yang maju dan tumbuh pesat.
- Bila $R_i > r$ dan $Y_i < Y$ maka Provinsi Riau merupakan daerah yang sedang bertumbuh.
- Bila $R_i < r$ dan $Y_i > Y$ maka Provinsi Riau merupakan daerah yang maju tetapi tertekan.
- Bila $R_i < r$ dan $Y_i < Y$ maka Provinsi Riau merupakan daerah yang relatif tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Klassen Typology*

Perkembangan perekonomian regional dapat dilihat dari pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan analisis *Klassen Typology*. Karakteristik pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi

di Provinsi Riau dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masing-masing sektor ekonomi. Analisis *klassen Typology* juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi dengan cara membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah per sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan dan pendapatan (PDRB per PDB).

Pada analisis *Klassen Typology* mengklasifikasikan sektor ekonomi menjadi 4 (empat) daerah yaitu ; 1. Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*); 2. Daerah Maju Tetapi Tertekan (*Retarde Region*) 3. Daerah Sedang Tumbuh (*Growing Region*) dan 4. Daerah Relatif Tertinggal (*Relatively Backward Region*).

Hasil analisis *Klassen Typology* terhadap sektor ekonomi di Provinsi Riau periode tahun 1999-2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Hasil Analisis *Klassen Typology* terhadap Sektor Ekonomi di Provinsi Riau periode tahun 1999-2013

Sektor	Riau		Nasional		Kriteria	
	Ri	Yi	r	Y		
1	1.10	0.16	0.60	0.14	Ri > r	Yi > Y
2	0.19	0.54	0.20	0.10	Ri < r	Yi > Y
3	1.47	0.10	1.35	0.27	Ri > r	Yi < Y
4	1.27	0.00	0.42	0.01	Ri > r	Yi < Y
5	2.46	0.03	1.48	0.06	Ri > r	Yi < Y
6	2.48	0.08	1.58	0.17	Ri > r	Yi < Y
7	2.08	0.03	4.05	0.07	Ri < r	Yi < Y
8	3.05	0.01	2.59	0.09	Ri > r	Yi < Y
9	1.88	0.05	1.17	0.09	Ri > r	Yi < Y

Keterangan :

1. Sektor Pertanian, 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian, 3. Sektor Industri dan Pengolahan, 4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Sektor Bangunan, 6. Sektor Perdagangan, 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9. Sektor Jasa-jasa.

Dimana :

Ri = Rata-rata presentase pertumbuhan PDRB sektor i di Provinsi Riau (%)

r = Rata-rata presentase pertumbuhan PDB sektor i Nasional (%)

Yi = Rata-rata kontribusi sektor i di Provinsi Riau (%)

Y = Rata-rata kontribusi sektor i di tingkat Nasional (%)

Tabel 5.1 menunjukkan hasil analisis *Klassen Typology* di Provinsi Riau periode tahun 1999-2013. Menunjukkan bahawa terdapat 1 (satu) sektor daerah maju dan tumbuh cepat, 1 (satu) sektor daerah maju tetapi tertekan, 6 (enam) sektor daerah sedang tumbuh, 1 (satu) sektor daerah relative tertinggal.

Sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Riau adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaann dengan hasil yaitu sebesar 3.05 persen dan sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan terendah di Provinsi Riau adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan hasil yaitu sebesar 0.19 persen.

Sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tingkat Nasional adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan hasil yaitu sebesar 4.05 persen kemudian diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan hasil yaitu sebesar 2.59 persen. Sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan terendah di

tingkat Nasional adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan hasil yaitu sebesar 0.20 persen meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di tingkat Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Riau yaitu sebesar 0.19%.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi terdapat 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Nasional. Sektor-sektor ekonomi di Provinsi Riau yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Nasional adalah : Sektor Pertanian yaitu sebesar 1.10 persen, Sektor Industri dan Pengolahan yaitu sebesar 1.47 persen, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yaitu sebesar 1.27 persen, Sektor Bangunan yaitu sebesar 2.46 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 2.48 persen, Sektor Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar 3.05 persen dan Sektor Jasa-jasa yaitu sebesar 1.88 persen.

Beberapa sektor ekonomi di Provinsi Riau yang berkontribusi lebih dibandingkan pada tingkat Nasional yaitu sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 0.16 persen sedangkan kontribusi sektor pertanian pada

tingkat Nasional hanya sebesar 0.14 persen. Kemudian kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.54 persen sedangkan kontribusi sektor pertambangan pada tingkat Nasional hanya sebesar 0.10 persen itu berarti kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Riau berkontribusi besar di tingkat Nasional.

Tabel 5.2 Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Riau menurut *Klassen Typology* periode 1999-2013

Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi	Kontribusi Sektor	
		$Y_i > Y$
$R_i > r$	<p>Daerah maju dan tumbuh cepat (<i>Rapid Growth Region</i>)</p> <p>1. Sektor Pertanian</p>	<p>Daerah sedang tumbuh (<i>Growing Region</i>)</p> <p>1. Sektor Industri dan Pengolahan</p> <p>2. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih</p> <p>3. Sektor Bangunan</p> <p>4. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran</p> <p>5. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Persusahaan</p> <p>6. Sektor Jasa-jasa</p>
$R_i < r$	<p>Daerah maju tetapi tertekan (<i>Retarde Region</i>)</p> <p>1. Sektor Pertambangan dan Penggalian</p>	<p>Daerah relatif tertinggal (<i>Relatively Backward Region</i>)</p> <p>1. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi</p>

Dimana :

R_i = Rata-rata presentase pertumbuhan PDRB sektor i di Provinsi Riau (%)

r = Rata-rata presentase pertumbuhan PDB sektor i Nasional (%)

Y_i = Rata-rata kontribusi sektor i di Provinsi Riau (%)

Y = Rata-rata kontribusi sektor i di tingkat Nasional (%)

Sektor daerah maju dan tumbuh cepat adalah sektor yang berpotensi di Provinsi Riau, dimana pertumbuhan dan kontribusi sektor tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor tersebut di tingkat Nasional. Sektor maju dan tumbuh cepat di Provinsi Riau hanya ada 1 (satu) yaitu ; Sektor Pertanian saja.

Sektor pertanian di Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan sebesar 1.10 persen dengan kontribusi sektor sebesar 0.16 persen sedangkan pertumbuhan sektor pertanian pada tingkat Nasional adalah sebesar 0.60 persen dengan kontribusi sektor sebesar 0.14 persen. Walaupun jarak angka perbandingannya sedikit, Sektor Pertanian di Provinsi Riau lebih potensial dan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian di tingkat Nasional.

Sektor sedang tumbuh merupakan sektor yang memiliki potensi untuk terus berkembang dan lebih baik lagi kedepannya, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu melakukan langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar sektor sedang tumbuh tersebut dapat terus berkembang dan mencapai sektor maju dan tumbuh cepat. Sektor-sektor ekonomi di Provinsi Riau yang termasuk dalam kategori sektor sedang tumbuh ini adalah : Sektor Industri dan Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Persusahaan dan Sektor Jasa-jasa.

Sektor maju tetapi tertekan merupakan sektor dimana laju pertumbuhan PDRB sektor tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sektor tersebut sedangkan kontribusi sektor di Provinsi Riau lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor tersebut di tingkat Nasional. oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu melakukan langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar sektor maju tetapi tertekan tersebut dapat terus berkembang dan mencapai sektor maju dan tumbuh cepat. Sektor-sektor ekonomi di Provinsi Riau yang termasuk dalam kategori

sektor maju tetapi tertekan ini adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Sektor relatif tertinggal merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat Nasional. Sektor-sektor ekonomi di Provinsi Riau yang termasuk dalam kategori sektor relatif tertinggal ini adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor yang termasuk pada kategori relatif tertinggal ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan kembali yaitu dengan kerja sama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu melakukan langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien antara sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya yang berada pada kategori sedang tumbuh agar sektor relatif tertinggal ini dapat terus berkembang dan mencapai sektor maju dan tumbuh cepat.

Menurut Riau Dalam Angka 2015, Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2014, panjang jalan 4.167,78 km, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya namun data Kabupaten/Kota tidak tersedia. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.759,75 km (42,22 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 1.145,37 km (27.48 persen), dan 30,29 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun 2014 sebanyak 1.013 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 302 unit jembatan beton, 474 unit jembatan komposit, 85 unit jembatan kayu dan 152 unit jembatan rangka.

Pada tahun 2014, pengiriman surat melalui kantor pos di Provinsi Riau sejumlah 910.634 surat, sementara penerimaan surat sejumlah 5.334.564 surat. Sebagian besar surat tersebut dikirim dan diterima melalui Kantor Pos Pekanbaru, yaitu 89,25 persen pengiriman dan 85,36 persen penerimaan. Jumlah pengiriman surat tercatat tahun 2014 sebanyak 430.225 paket, terdiri dari 428.378 paket dalam negeri dan 1.847 paket luar negeri (Riau Dalam Angka, 2015).

Dari data-data tersebut, persentase laju pertumbuhan dan persentase kontribusi dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi Provinsi Riau lebih kecil dibandingkan dengan persentase laju pertumbuhan dan persentase kontribusi Nasional ditunjukkan dengan data pada tabel hasil analisis *Klassen Typology* diatas.

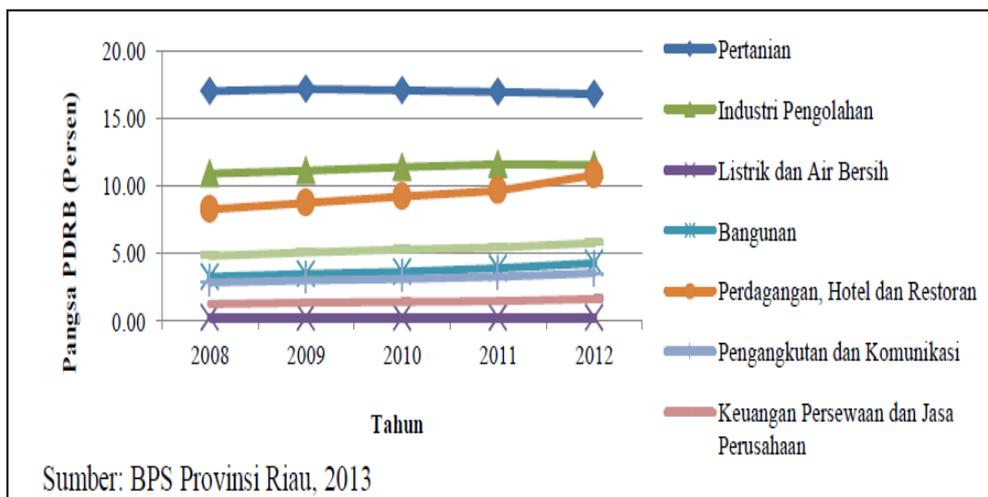
Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumberdaya alam yang dapat dioptimalkan seperti sumberdaya pertanian/perkebunan, sumberdaya pertambangan dan penggalian serta sumberdaya laut/perairan. Selama tahun 2008-2012, sektor pertambangan dan penggalian mendominasi perekonomian Provinsi Riau.

Namun, sektor pertambangan tidak dapat diandalkan sebagai motor penggerak dalam perekonomian Provinsi Riau, karena sumberdaya alam dari sektor pertambangan dan penggalian bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, sektor pertanian khususnya sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berperan sebagai pemasok bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber pendapatan bagi masyarakat Provinsi Riau.

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB suatu daerah hanya menyajikan dampak langsung (*direct effect*) terhadap perekonomian Provinsi Riau. Berdasarkan PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan, selama periode tahun 2008-2012, terlihat bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi sektor ekonomi tanpa migas Provinsi Riau masih didominasi tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk melihat pangsa PDRB sektor ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 5.1 Perkembangan Pangsa PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa sektor pertanian memiliki pangsa PDRB tertinggi terhadap PDRB tanpa migas Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Riau semakin meningkat. Tingginya pangsa PDRB sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Riau terutama disumbangkan oleh sektor perkebunan (BPS Provinsi Riau, 2013).

a. Kehutanan

Potensi sumber daya hutan di Provinsi Riau meliputi luas kawasan hutan mencapai 7.121.344 ha (SKMenhut No.: SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011). Kemudian pada tahun 2014 terbit Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.673/Menhut-II/2014 yang mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 1.638.249 ha. Setelah itu terbit SK Menhut No.: SK.878/Menhut-II/2014 yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Riau adalah 5.499.693 ha.

Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai, apabila dilakukan perubahan paradigma secara mendasar. Paradigma dimaksud berupa pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu (*timber Management*)

menjadi pengelolaan sumber daya (*resources-based management*), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik serta pengelolaan sumber daya yang berkeadilan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Riau mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No.:173/Kpts-II/1986 adalah 9.465.160 ha (luas Provinsi Riau dan Kepulauan Riau). Berdasar pada SK Menteri Kehutanan No.: 7651/Menhut-VII/KUH/2011 luas kawasan hutan Provinsi Riau sebesar 7.121.344 ha. Pada tahun 2014 luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasar pada SK Menhut No.: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 menjadi 5.502.255 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Provinsi Riau terdiri dari areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan suaka alam/hutan pelestarian alam. Adapun luas sesuai fungsi kawasan berdasar pada SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 dan perhitungan SIG sebagaimana Tabel 5.3. berikut.

Tabel 5.3 Luas Kawasan Hutan di Propinsi Riau

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Konservasi (HK)	633.768	11,52
2	Hutan Lindung (HL)	238.96	4,34
3	Hutan Produksi (HP)	2.314.151	42,06
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.034.767	18,81
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	1.280.609	23,27
	Jumlah	5.502.255	100,00

Sumber : SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 & Analisis SIG, 2014

Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan

kawasan hutan untuk perkebunan dan transmigrasi serta melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) masih perlu ditingkatkan.

Dalam awal perkembangannya, pembangunan kehutanan bidang perusahaan hutan di Provinsi Riau memakai sistem konsesi Hak Perusahaan Hutan (HPH) sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 1970. Kegiatan HPH di Riau mulai dilaksanakan pada era tahun 70-an yang pada saat itu berjumlah 63

unit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan HPH dirubah menjadi IUPHHK-HA. Pada tahun 2014, hanya terdapat 4 perusahaan IUPHHK-HA yang aktif, 2 perusahaan tidak aktif (PT Hutani Sola dan PT Bara Induk) dan 8 perusahaan dicabut izinnya.

Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Riau melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang sebelumnya disebut Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dimulai sejak tahun 1983 dan sebagai cikal bakalnya melalui pengelolaan hutan oleh pemegang HPH dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan. Di Provinsi Riau selama rentang waktu sejak digulirkannya program pembangunan hutan tanaman oleh pemerintah, luas areal hutan yang dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman meningkat secara signifikan. Jumlah IUPHHK-HTI sampai dengan 2013 adalah sebanyak 58 unit seluas 1.673.060 Ha.

Hutan sebagai penyangga kehidupan secara alamiah merupakan harapan semua pihak karena terkait dengan keberlangsungan hidup dan kehidupan. Luas dan kualitas hutan bagi suatu wilayah menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan karena diharapkan mampu menyediakan produk yang diperlukan oleh

mahluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Hutan memiliki nilai keberlanjutan dan menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan. Manfaat hutan dapat dinikmati secara terus menerus bila hutan juga terpelihara kelestariannya.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terbatas pada manfaat hutan yang berupa hasil hutan yang terhitung, bernilai uang, dan hasil hutan yang telah dipasarkan. Oleh karenanya, kawasan hutan Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan daerah secara berkesinambungan di masa sekarang dan yang akan datang. Selain kontribusi dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, nibung, dan sagu serta berbagai jenis keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar, hutan Riau dapat memberikan manfaat yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan wisata alam diantaranya penyediaan oksigen, absorpsi CO₂, stok karbon, penyedia biomasa, *catchment area* dan keindahan alam. Hutan Riau juga diharapkan menjadi solusi terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru (bioenergi, panas, dan air).

Keberadaan hutan di Provinsi Riau diyakini mampu berfungsi sebagai pengatur tata air yang dapat meminimalkan terjadinya banjir, menjaga iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, dan perlindungan habitat flora dan fauna. Rusaknya hutan dapat berimbas pada terganggunya siklus hidrologi DAS. Serangkaian bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini diduga terkait dengan kerusakan hutan di kawasan hulu DAS. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembukaan dan penebangan hutan berdampak negatif berupa peningkatan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir.

Pada sisi lain kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Riau tidak hanya berperan sebagai penyeimbang iklim global, namun juga memberikan peluang ekonomi dalam skema perdagangan karbon baik melalui skema *voluntary* maupun mandatori. Sayangnya, pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan Provinsi Riau masih menghadapi berbagai tantangan seperti kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan kehutanan dan masih rendahnya persepsi dan apresiasi tentang nilai hutan.

Selanjutnya, kontribusi kehutanan terhadap aspek ekologi dapat dilihat dari fungsi hutan sebagai perlindungan flora dan fauna, perlindungan daerah aliran sungai (DAS) untuk menyimpan persediaan air tanah, perlindungan dari bahaya erosi dan banjir, dan potensi keanekaragaman hayati. Kelestarian fungsi ekologi inilah yang menjadi ukuran manfaat kehutanan dari aspek ekologi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di Provinsi Riau. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi sangat penting karena pada akhirnya masyarakat adalah penerima manfaat pembangunan kehutanan. Pengelolaan hutan tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspek bio-fisik semata. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan salah satu bentuk tatanan pengelolaan hutan yang ditawarkan pemerintah untuk mengakomodir berbagai kepentingan pihak terkait sumber daya hutan.

Dalam melihat potensi kehutanan Riau pada dimensi sosial budaya dapat dikemukakan bahwa indikator yang digunakan adalah luasan hutan yang bersinggungan langsung dengan pemukiman masyarakat. Selain itu, yang juga berpengaruh adalah letak lokasi

pemukiman penduduk itu berada di dalam kawasan hutan, atau di pinggir kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kerawanan sosial dalam pengelolaan kehutanan di Riau dapat terjadi jika lokasi pemukiman penduduk berada di dalam kawasan hutan, dan bersinggungan dengan kawasan hutan. Pada sisi lain, tingkat mata pencaharian dan sistem produksi penduduk sangat menentukan pula tingkat kerawanan sosial yang dapat ditimbulkan oleh penduduk yang tinggal di pinggir hutan.

Konflik kepentingan terutama klaim tenurial antara pengelola IUPHHK-HA ataupun IUPHHK-HTI dengan pihak masyarakat yang tinggal di dalam maupun bersinggungan dengan kawasan hutan ini tentunya akan memicu terjadinya konflik, terutama apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah. Konflik biasanya diawali dengan penetapan tapal batas antara lahan hutan yang diberikan izin konsesi dengan lahan hutan yang menjadi "ruang hidup" bagi penduduk setempat yang mata pencahariannya masih tergantung kepada hasil hutan, atau sumberdaya hutan kayu maupun sumberdaya hutan non kayu. Apabila penentuan tapal batas antara lahan hutan perkampungan yang menjadi lahan ruang hidup penduduk lokal ini dilakukan secara partisipatif, maka klaim terhadap tenurial biasanya akan rendah.

Hampir semua wilayah kabupaten berbasis kehutanan memiliki permukiman penduduk yang bersinggungan dengan kawasan hutan, baik kawasan yang diberi izin konsesi maupun kawasan hutan yang dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Oleh karenanya tingkat kepentingan dalam pengelolaan pada aspek ekologi terutama penebangan hutan atau pencurian kayu di kawasan konservasi dan produksi berpotensi sangat tinggi. Disamping itu, tingkat kepentingan dalam pengelolaan aspek sosial budaya juga menunjukkan kerawanan sosial yang tinggi, karena pada beberapa daerah justru di dalam wilayah kawasan hutan terdapat pemukiman penduduk. Di beberapa tempat,

justru memiliki pemukiman penduduk yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Dapat dikatakan dari aspek ekologi dan aspek sosial budaya, maka derajat kepentingan ekologi dan sosial budaya berada pada tingkat kerawanan ekologi dan kerawanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan kehutanan Riau ke depan haruslah fokus kepada bagaimana mengatasi tingkat kerawanan ekologi dan kerawanan sosial ini.

Depleksi sumber daya hutan dan degradasi lingkungan merupakan isu strategis yang terkait dengan dampak aktivitas pembangunan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan indikasi banyaknya kejadian bencana alam yang sangat serius, misalnya banjir besar, kekeringan, dan tanah longsor. Hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu yang bernilai ekonomi, tetapi juga sangat berperan bagi lingkungan, diantaranya untuk mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan penyerap emisi gas CO₂. Untuk itu, peran hutan sebagai jasa lingkungan perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Khususnya, melalui penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan, sehingga pemahaman tentang nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung dari sumber daya hutan semakin dipahami.

b. Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan merupakan motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus tersebut, terutama fokus Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan pentingnya Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 adalah tepat mengingat letak geografis Provinsi Riau yang strategis sehingga secara langsung akan berhadapan dengan Negara tetangga didalam kancah persaingan global.

Oleh sebab itu diperlukan Ketangguhan ekonomi dan sosial budaya sehingga sudah barang tentu peranan

pangan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemiskinan dan kualitas sumberdaya manusia Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan.

Subsistim Distribusi dan Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pemerintah berperan dalam hal pembinaan, pengetahuan,

pengendalian dan pengawasan terhadap Pangan dalam hal jumlah dan mutu pangan, keragaman, keamanan, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dilain pihak masyarakat berperan aktif menyelenggarakan produksi dan pengadaan bahan pangan, menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan distribusi.

Dalam Undang-undang No.7 tahun 1996, dijelaskan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau akan berkerja dan berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Provinsi Riau melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, pelatihan serta penyuluhaj akan terus dikembangkan.

Secara umum situasi ketahanan pangan di Provinsi Riau pada periode

2004-2008 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan antara lain (1). Produksi beberapa komoditas pangan penting cenderung meningkat, (2). Pergerakan harga-harga pangan lebih stabil, baik secara

umum maupun menjelang hari-hari besar keagamaan nasional, (3). Konsumsi pangan masyarakat meningkat, (4). Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun. Berbagai indikasi yang terukur tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang positif, kemudian dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas dari aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi dan aspek konsumsi.

Selama periode 2004 – 2008 perluasan areal panen dan peningkatan penggunaan pupuk pada pertanian tanaman pangan telah mendorong peningkatan produksi pada sebagian besar kelompok komoditas ini. Secara umum produksi keseluruhan komoditas pangan meningkat sebesar 2,79 persen, kondisi ini merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan terutama peningkatan yang terjadi pada produksi beras. Hal ini mengingat relatif terbatasnya potensi areal persawahan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau. Komoditas sayuran mencatat pertumbuhan tertinggi pada kelompok tanaman pangan yaitu mencapai 29.1 %. Produksi beras dan kedelai masing-masing meningkat sebesar 2,03 % dan 11,02 % diikuti oleh ubi jalar (5,81%) dan sagu (4,64 %) dan ikan (3,37 %). Empat komoditas lainnya ternyata mengalami penurunan produksi yaitu jagung, buah-buahan, kacang tanah dan telur.

Meskipun produksi sebagian besar komoditas pangan menunjukkan perkembangan yang meningkat selama periode 2004-2008, sebagai daerah yang mengalami defisit pangan dalam jumlah yang cukup besar, peningkatan ini ternyata masih belum mampu mengurangi laju peningkatan pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap

hampir seluruh komoditas pangan dasar yang bergerak lebih cepat dibandingkan peningkatan produksi pangan

lokal telah berakibat pada meningkatnya pasokan pangan ke Provinsi Riau yang mencapai 4,23% selama periode 2005 - 2008.

Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah : 1.) masing tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); 2) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampu mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; 3) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; 4) kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu; 5) jenis tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kiiawi; 6) sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan 7)

rendahnya akses petani terhadap modal usaha.

Komponen yang tidak kalah penting dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah pemasukan pangan dari luar Provinsi Riau, baik antar Provinsi bahkan antar negara. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumahtangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam membangun kemandirian pangan, idealnya peran pasokan dari luar semakin hari

semakin menurun dan digantikan dengan peningkatan peran produksi domestik. Namun data yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pasokan dari luar Provinsi untuk ke empat komoditas pangan yang dimaksud ternyata masih cukup tinggi dan buah-buahan

menempati peringkat tertinggi untuk peningkatan pasokan dari luar.

Komoditas yang paling dominan dalam pasokan pangan dari luar Provinsi Riau adalah beras (>46,5 %) dari total pasokan pangan dengan trend yang semakin meningkat (1,85 %). Kondisi tersebut akibat kemampuan produksi beras hanya mampu mendukung maksimal 57 % kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah beras yang masuk, tidak semuanya dikonsumsi di dalam provinsi namun didistribusikan kembali menuju beberapa provinsi tetangga. Pasokan pangan dari luar daerah Riau yang mengalami peningkatan yang terbesar setiap tahunnya adalah daging (18,16 %), kedele (16,36 %), ubi jalar (16,24 %), buah-buahan (10,04 %) dan ikan (6,85 %).

Ketahanan pangan di tingkat mikro dapat diketahui dari ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita per hari selanjutnya dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang direkomendasikan atau standar kecukupan gizi. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di suatu daerah

belum dapat menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini

tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, baik dalam arti fisik (daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli).

Ketersediaan rata-rata energi dan protein untuk dikonsumsi penduduk di Riau telah melebihi dari angka kecukupan yang dianjurkan yakni energi sebesar 2200 Kkalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kap/hari Rata-rata ketersediaan energi untuk konsumsi penduduk pada tahun 2008 mencapai 2807 Kkal/kap/hari, bila dibandingkan dengan ketersediaan tahun 2004, ternyata menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 1.01 persen setiap tahunnya. Sedangkan jumlah protein yang tersedia untuk dikonsumsi telah mencapai 108.7 gram/kap/hari. Bila dibandingkan dengan tahun 2004, ketersediaan protein ternyata juga menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebesar 0.74 persen. Penurunan ketersediaan protein ini disebabkan ketersediaan protein hewani yang mengalami penurunan sebesar 2,22 persen. Kualitas / keanekaragaman pangan yang tersedia selama periode 2004 – 2008 menunjukkan trend yang tidak meningkat, meskipun telah mencapai 80.

c. Perkebunan

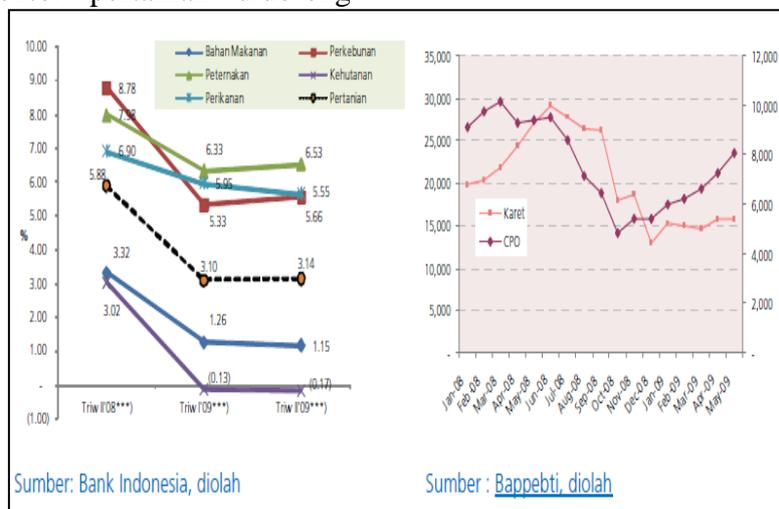
Tabel 5.4 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas Triwulan II 2009 (% ,y-o-y)

No.	Sektor	Tw II 08**)		Tw III 08**)		Tw IV 08**)		Tw I 09***)		Tw II 09***)	
		Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa
1	Pertanian	5.88	20.21	5.74	20.04	2.09	17.10	3.10	17.73	3.14	18.60
2	Pertambangan dan Penggalian	6.13	43.05	5.52	44.50	4.00	46.36	2.85	45.22	0.88	44.47
3	Industri Pengolahan	7.25	18.35	7.88	18.01	8.37	18.61	5.35	18.39	5.27	18.26
4	Listrik dan Air Bersih	6.33	0.18	6.86	0.15	7.25	0.16	5.60	0.17	4.87	0.16
5	Bangunan	9.45	4.23	10.47	4.03	14.61	4.22	9.31	4.15	8.21	4.34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.46	7.08	10.50	7.01	7.50	6.99	7.95	7.63	8.02	7.49
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9.95	1.89	10.21	1.62	12.03	1.71	9.93	1.77	8.64	1.73
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	12.68	1.70	14.22	1.87	13.87	2.01	12.20	1.99	11.76	1.93
9	Jasa-jasa	9.14	3.32	9.30	2.78	9.34	2.84	9.26	2.96	8.63	3.00
PDRB Termasuk Migas		6.97	100	6.78	100	5.37	100	4.42	100	3.26	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
 Keterangan : ***) angka sangat sementara, **) angka sementara, *) angka perbaikan

Pertumbuhan (y-o-y,%) sektor pertanian dalam triwulan II-2009 diperkirakan mencapai 3,14%, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,10% namun masih melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,88%. Relatif meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian didorong

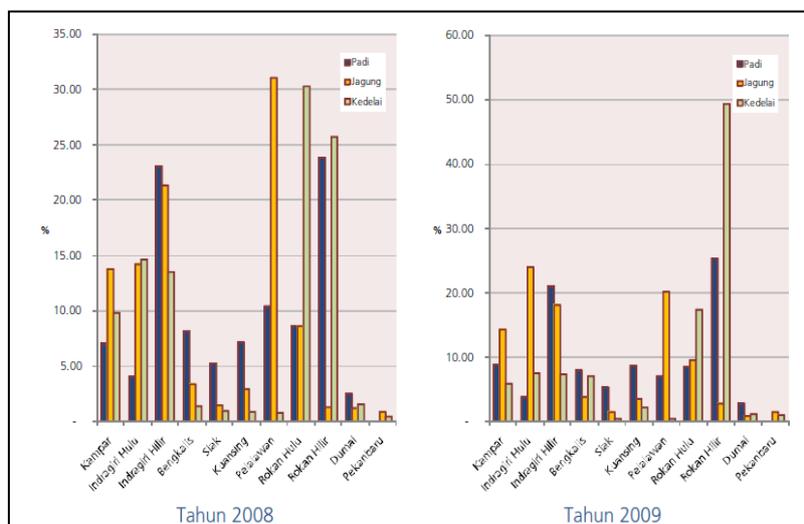
oleh peningkatan produksi pada sub sektor perkebunan yang pada triwulan laporan tumbuh sebesar 5,55%. Hal ini seiring dengan meningkatnya ekspor CPO triwulan II-2009 sebesar 4,28. Meskipun demikian, ekspor CPO secara semesteran belum terlihat cukup membaik dimana mengalami kontraksi sebesar 17,65%.



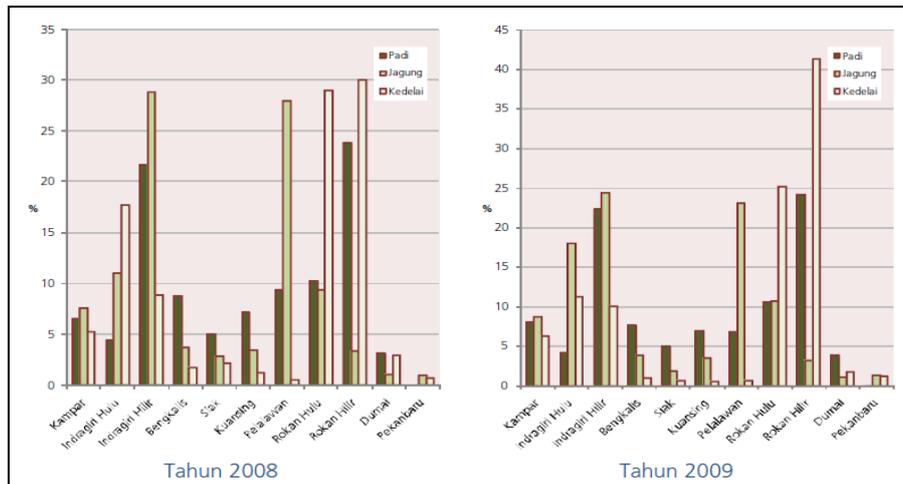
Gambar 5.2 Pertumbuhan (y-o-y,%) Sub Sektor Pertanian dan Pergerakan Harga CPO dan Karet Tahun 2008-2009

Sementara itu, dalam triwulan laporan, diketahui bahwa pertumbuhan (y-o-y,%) sub sektor tanaman bahan makanan diperkirakan sedikit mengalami perlambatan akibat banjir yang terjadi di

Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu penghasil padi dan tanaman palawija terbesar di Provinsi Riau.



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, diolah
 Gambar 5.3 Proporsi Luas Tanam Tanaman Bahan Makanan Utama Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, diolah
 Gambar 5.4 Proporsi Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Menurut Kabupaten/Kota

Selama tahun 2008, kontribusi luas tanam dan produksi tanaman bahan makanan seperti Padi dan Jagung di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 20%¹. Tentunya adanya banjir di lokasi tersebut mengakibatkan produksi tanaman bahan makanan mengalami penurunan. Pada tahun 2009, Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir menjadi sasaran produksi utama untuk tanaman padi

dan palawija di Provinsi Riau. Meskipun demikian, produksi dan luas lahan tanaman bahan makanan seperti padi, kedelai & jagung diperkirakan akan meningkat sebesar 16,62% menjadi 576,41 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan akan direalisasikannya program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM).

Tabel 5.5 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas Triwulan IV 2009 (% ,y-o-y)

No.	Sektor	Tw IV 08*)		Tw I 09**)		Tw II 09**)		Tw III 09**)		Tw IV 09**)	
		Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share
1	Pertanian	2,09	17,10	3,10	17,73	3,14	19,18	2,25	19,50	6,07	19,45
2	Pertambangan dan Penggalian	4,00	46,36	2,85	45,22	0,42	42,74	0,05	40,96	1,06	39,61
3	Industri Pengolahan	8,37	18,61	5,35	18,39	5,82	18,84	3,60	19,52	5,02	20,42
4	Listrik dan Air Bersih	7,25	0,16	5,60	0,17	4,87	0,17	-0,93	0,16	2,80	0,16
5	Bangunan	14,61	4,22	9,31	4,15	8,21	4,48	8,29	4,79	8,73	4,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,50	6,99	7,95	7,63	8,02	7,72	9,37	7,84	9,50	7,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12,03	1,71	9,93	1,77	8,64	1,79	7,38	1,82	6,69	1,82
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	13,87	2,01	12,20	1,99	11,76	1,99	8,21	2,08	8,23	2,22
9	Jasa-jasa	9,34	2,84	9,26	2,96	8,63	3,10	7,63	3,34	8,11	3,48
PDRB dengan Migas		5,37	100,00	4,42	100,00	3,07	100,00	2,52	100,00	3,91	100,00

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV-2009 (yoy) mencapai 6,07%, mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,25%. Sektor pertanian mempunyai pangsa yang cukup besar yaitu mencapai 33,26% dari total PDRB tanpa

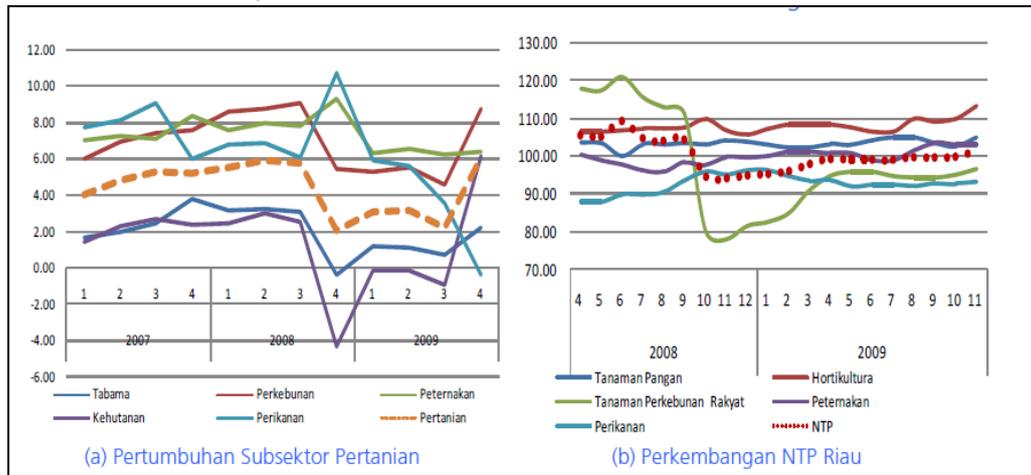
Kedua subsektor tersebut juga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu

migas, namun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 34,16%. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan laporan utamanya didorong oleh pertumbuhan subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan.

masing-masing sebesar 8,81% dan 6,18%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan

pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,57% dan -0,91%. Subsektor perkebunan dan kehutanan juga mempunyai pangsa terbesar yaitu masing-masing sebesar 49% dan 33,65% dari PDRB

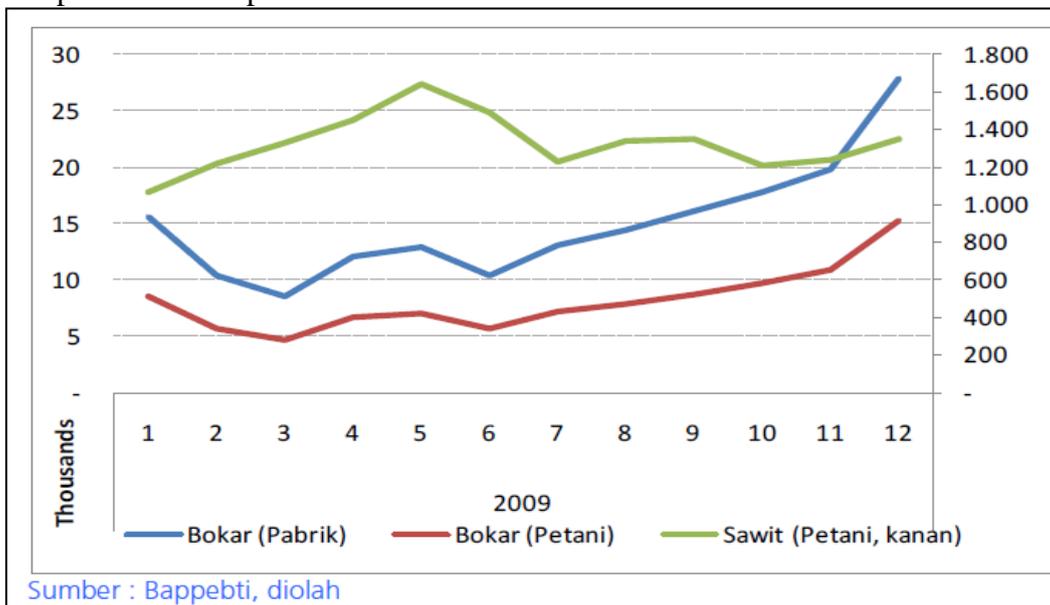
sektor pertanian. Peningkatan pada sektor pertanian juga ditunjukkan dengan meningkatnya NTP Riau pada semua subsektornya menjelang akhir tahun 2009.



Gambar 5.5 Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkembangan NTP Riau

Membbaiknya harga komoditas sawit dan CPO sejak triwulan III-2009 yang lalu telah mendorong peningkatan produksi komoditas ini. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas sawit dan CPO. Masa puncak panen (*peak crop*) kelapa sawit yang jatuh pada triwulan ke IV-2009 juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, karena terjadi peningkatan produksi hasil pertanian.

Selain itu, peningkatan harga bahan olahan karet (bokar) akibat meningkatnya permintaan terhadap komoditas ini juga telah mendorong peningkatan produksi karet yang didorong mulai pulihnya kondisi pasar otomotif dunia. Sekitar 90% produksi karet Riau ditujukan untuk pasar ekspor¹, terutama untuk bahan baku ban kendaraan, dengan negara tujuan utama ekspor karet adalah Cina, Amerika, dan Jepang.



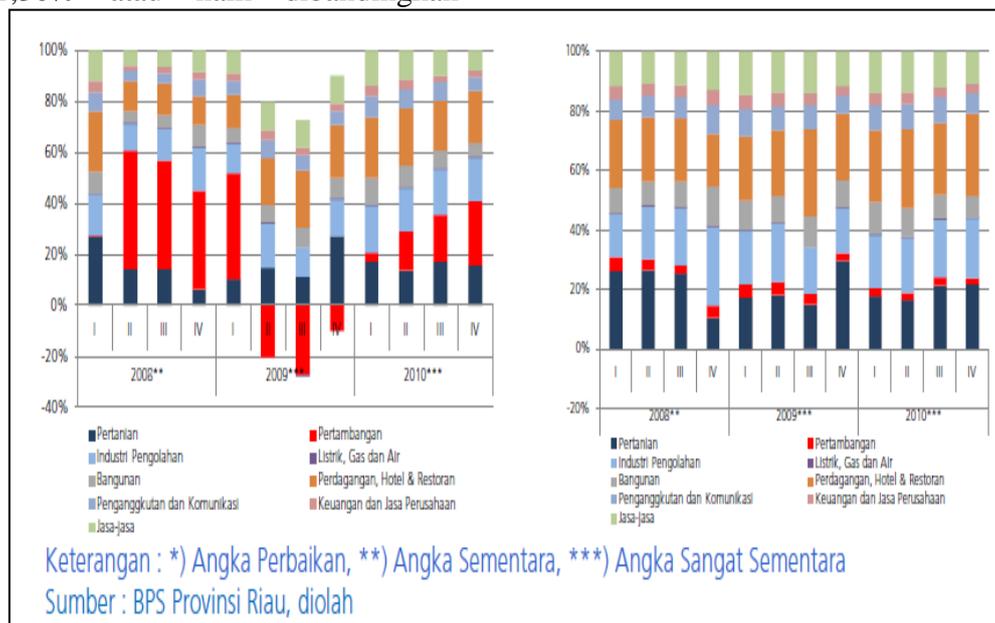
Gambar 5.6 Perkembangan Harga Komoditas Bahan Olahan Karet dan kepala Sawit

Namun demikian, subsektor perikanan masih mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu turun hingga 0,33% dari sebelumnya 3,59%. Kondisi cuaca yang kurang baik selama triwulan IV-2009, telah menyebabkan menurunnya frekuensi nelayan turun ke laut, yang menyebabkan menurunnya hasil produksi subsektor perikanan.

Pertumbuhan ekonomi sektoral Riau pada triwulan IV-10 juga menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Secara umum, motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral utamanya berasal dari sektor *tradables* khususnya sektor pertambangan. Sumbangan sektor pertambangan tercatat sebesar 1,30% atau naik dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,86%.

Meningkatnya sumbangan sektor tersebut diindikasikan sejalan dengan adanya optimalisasi dari produksi sumur minyak yang mengakibatkan volume lifting minyak mengalami titik puncaknya selama tahun 2010. Peran sektor *tradables* lain seperti sektor industri pengolahan dan pertanian juga relatif menunjukkan hal yang sejalan dengan perkembangan ekonomi triwulan laporan. Kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh peningkatan produktivitas tanaman sektor pertanian dan kapasitas terpakai pada sektor industri non migas seperti CPO, karet olahan dan *pulp and paper*.



Gambar 5.7 Sumbangan Pertumbuhan (Dengan Migas) Menurut Sektoral dan Sumbangan Pertumbuhan (Tanpa Unsur Migas) Menurut Sektoral (yoy,%) (yoy,%)

Pada triwulan laporan, pertumbuhan sektor *tradables* (pertanian, pertambangan dan industri pengolahan) mencatat pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010. Secara khusus, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi didalam sektor tradables dengan angka mencapai 7,92%. Berdasarkan survei kepada

beberapa pelaku industri, diketahui bahwa hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan kapasitas produksi terutama pada industri *pulp and paper*. Di sisi lain, kapasitas produksi sektor industri CPO dan karet olahan juga relatif stabil meskipun input bahan baku sedikit terganggu akibat tingginya curah hujan selama periode triwulan laporan.

Tabel 5.6 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral (yoy)

PDRB Sisi Sektoral	2008**				2009**				2010***			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Pertanian	5,56	5,88	5,74	2,09	3,18	3,24	2,32	6,16	2,98	3,08	4,82	4,86
2. Pertambangan	0,03	6,13	5,52	4,00	4,18	(1,40)	(1,87)	(0,75)	0,19	1,12	1,74	2,66
- Migas	(0,28)	5,95	5,39	3,81	3,99	(1,66)	(2,10)	(0,94)	0,02	0,97	1,56	2,54
- Non Migas	24,58	18,97	14,05	16,18	16,00	15,68	11,86	9,96	9,60	9,64	11,06	8,66
3. Industri Pengolahan	5,11	7,25	7,88	8,37	5,47	5,98	3,75	4,95	4,99	5,93	7,76	7,92
- Migas	0,92	3,33	2,83	0,08	1,08	1,25	(0,50)	0,97	1,46	2,23	4,74	4,98
- Non Migas	6,53	8,61	9,54	11,04	6,88	7,53	5,05	6,11	6,07	7,07	8,64	8,73
4. Listrik, Gas dan Air	6,99	6,33	6,86	7,25	5,76	5,00	(0,77)	2,91	3,82	5,08	8,90	4,62
5. Bangunan	9,84	9,45	10,47	14,61	9,50	8,32	8,45	8,87	9,14	9,47	9,07	7,77
6. Perdagangan	10,50	10,46	10,50	7,50	8,14	8,13	9,53	9,64	8,05	9,77	10,50	12,22
7. Pengangkutan	9,51	9,95	10,21	12,03	10,05	8,80	7,52	6,87	7,98	9,40	11,31	8,97
8. Keuangan	13,77	12,68	14,22	13,87	12,38	11,89	8,38	8,37	8,94	10,32	10,16	9,03
9. Jasa-jasa	9,21	9,14	9,30	9,34	9,43	8,78	7,81	8,22	8,07	8,85	8,98	7,89
Total	3,45	6,97	6,78	5,37	5,17	2,18	1,60	3,03	2,90	3,77	4,76	5,22
Tanpa Migas	7,98	8,35	8,54	7,38	6,67	6,55	5,70	7,33	6,01	6,75	7,95	7,84

Keterangan : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Pertumbuhan sektoral tertinggi pada triwulan laporan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 12,22% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,50%. Hal ini diperkirakan seiring dengan penguatan kondisi ekonomi Riau yang terjadi dalam triwulan laporan serta dipengaruhi oleh faktor musiman berupa hari raya natal dan perisapan menjelang pergantian tahun.

Dalam triwulan laporan, pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Riau mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 4,86%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,82%. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh membaiknya kinerja sub sektor kehutanan, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut, kontraksi yang terjadi pada sub sektor kehutanan pada triwulan laporan merupakan yang terendah selama tahun 2010. Hal ini juga terkonfirmasi dari hasil survei yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha, dimana pasokan bahan mentah hasil hutan seperti kayu relatif lebih mudah didapatkan dan mengalami peningkatan.

Tabel 5.7 Pertumbuhan Sub Sektor di Sektor Pertanian Riau (yoy)

PDRB Sisi Sektoral	2008**				2009**				2010***			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
a. Tanaman Bahan Makanan	3,21	3,32	3,15	(0,33)	1,36	1,30	0,88	2,45	3,22	3,34	3,98	3,99
b. Tanaman Perkebunan	8,64	8,78	9,14	5,49	5,33	5,55	4,57	8,81	5,45	6,14	8,91	8,85
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	7,59	7,98	7,82	9,35	6,51	6,64	6,40	6,57	4,33	4,81	6,07	6,03
d. Kehutanan	2,43	3,02	2,53	(4,34)	(0,00)	(0,00)	(0,81)	6,34	(0,81)	(1,86)	(0,93)	(0,30)
e. Perikanan	6,78	6,90	6,13	10,74	6,11	5,80	3,77	(0,23)	4,63	5,87	7,74	5,89
Pertanian	5,56	5,88	5,74	2,09	3,18	3,24	2,32	6,16	2,98	3,08	4,82	4,86

Keterangan : *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Perkembangan sub sektor perkebunan Riau yang menguasai pangsa terbesar juga relatif stabil dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Berdasarkan informasi dari *contact liaison*, diketahui bahwa relatif tingginya curah hujan pada akhir tahun 2010

mengakibatkan beberapa petani plasma kesulitan dalam memanen kebunnya, namun

hal ini tidak berdampak signifikan terhadap produksi TBS secara umum.

Tabel 5.8 Pertumbuhan Sub Sektor di Sektor Pertanian Riau (yoy)

Keterangan	Periode			Perkembangan			
	2008	2009 (ATAP)	2010 (ARAM III)	2008 - 2009		2009-2010	
				Absolut	%	Absolut	%
a Luas Panen							
- Januari - April	79.411	69.943	74.911	(9.468)	(11,92)	4.968	7,10
- Mei - Agustus	51.000	52.560	45.884	1.560	3,06	(6.676)	(12,70)
- September - Desember	17.385	26.920	26.674	9.535	54,85	(246)	(0,91)
- Januari - Desember	147.796	149.423	147.469	1.627	1,10	(1.954)	(1,31)
b Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	31,36	32,79	36,21	1,43	4,56	3,42	10,43
- Mei - Agustus	37,39	39,37	39,01	1,98	5,30	(0,36)	(0,91)
- September - Desember	31,40	35,35	35,72	3,95	12,58	0,37	1,05
- Januari - Desember	33,44	35,57	36,99	2,13	6,36	1,43	4,02
c Produksi (ton)							
- Januari - April	248.995	229.344	271.276	(19.651)	(7,89)	41.932	18,28
- Mei - Agustus	190.675	206.910	178.980	16.235	8,51	(27.930)	(13,50)
- September - Desember	54.590	95.175	95.285	40.585	74,35	110	0,12
- Januari - Desember	494.260	531.429	545.541	37.169	7,52	14.112	2,66

Keterangan : Bentuk Produksi Padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Sementara itu, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan Riau pada triwulan laporan juga relatif stabil berada pada angka 3,99%. Berdasarkan angka ARAM III 2010, hal ini secara tidak langsung bersumber dari peningkatan produktivitas padi yang pada triwulan laporan diperkirakan mencapai 1,04% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,91%.

Kinerja ekonomi sektoral Riau pada triwulan laporan secara umum menunjukkan hal yang menggembirakan dimana seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Pada sektor *tradables*, motor penggerak perekonomian Riau utamanya berasal dari sektor pertambangan dan industri pengolahan.

Sementara, pada sektor *non tradables*, sektor perdagangan masih tetap menjadi roda penggerak utama perekonomian sejalan dengan meningkatnya berbagai aktivitas kegiatan dunia selama triwulan laporan.

Pertumbuhan tertinggi secara sektoral terjadi pada sektor bangunan yaitu sebesar 14,04% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2011 dan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,77% (yoy). Relatif tingginya pertumbuhan pada sektor bangunan diindikasikan sejalan dengan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur PON 2012 yang dijadwalkan akan selesai pada pertengahan tahun 2012.

Tabel 5.9 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral (yoy)

PDRB	2010**				2011***			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	2,98	3,08	4,82	4,86	4,55	3,94	3,58	2,41
Pertambangan	0,19	1,12	1,74	2,66	0,89	-0,37	0,27	1,97
- Migas	0,02	0,97	1,56	2,54	0,65	-0,65	-0,01	1,75
- Non Migas	9,60	9,64	11,06	8,66	12,89	13,94	13,65	12,62
Industri Pengolahan	4,99	5,93	7,76	7,92	7,42	7,42	7,66	5,19
- Migas	1,46	2,23	4,74	4,98	2,28	1,79	3,81	2,60
- Non Migas	6,07	7,07	8,64	8,73	8,91	9,09	8,74	5,88
Listrik, Gas dan Air	3,82	5,08	8,90	4,62	5,46	7,56	9,21	6,73
Bangunan	9,14	9,47	9,07	7,77	9,99	12,38	13,25	14,04
Perdagangan	8,05	9,77	10,50	12,22	9,10	9,13	9,61	12,38
Pengangkutan	7,98	9,40	11,31	8,97	8,91	9,02	9,59	11,12
Keuangan	8,94	10,32	10,16	9,03	9,58	9,37	9,46	10,22
Jasa-jasa	8,07	8,85	8,98	7,89	8,04	8,07	8,82	8,92
Total	2,90	3,77	4,76	5,22	4,04	3,44	3,93	4,63
Tanpa Migas	6,01	6,75	7,95	7,84	7,51	7,54	7,64	7,40

Keterangan : ***) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Sektor pertanian Riau pada triwulan IV-2011 tercatat tumbuh melambat sebesar 2,41%, sejalan dengan tidak optimalnya produksi tanaman perkebunan kelapa sawit meskipun berada pada siklus panen. Hal ini utamanya disebabkan oleh relatif tingginya curah hujan bulan November hingga Desember sehingga mengakibatkan banjir di beberapa daerah seperti Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu yang merupakan sentra produksi tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau.

Kondisi ekonomi Riau pada triwulan IV-2013, dari sisi sektoral, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dimana

sektor *tradables* tercatat sebagai motor penggerak utama pertumbuhan triwulan IV-2013. Secara tahunan, pertumbuhan sektor *tradables* Riau tumbuh meningkat menjadi 3,36% (yoy). Sementara dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan sektor *tradables* tumbuh lebih tinggi yakni mencapai 7,20% (yoy). Lebih lanjut, selain didorong oleh kenaikan pertumbuhan sektor *tradables*, peningkatan ekonomi Riau pada triwulan laporan juga tidak terlepas dari membaiknya pertumbuhan sektor *non-tradables* yang tercatat tumbuh dari 2,88% (yoy) pada triwulan III-2013 menjadi 4,84% (yoy) pada triwulan IV-2013.

Tabel 5.10 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Dengan Migas (yoy,%)

Keterangan	2012***	2013 (r)		2013	Sumbangan (%)			
		III***	IV***		2012	III-13	IV-13	2013
A. Sektor Tradables	0.44	1.95	3.36	1.20	0.34	1.42	2.44	0.89
1 Pertanian	2.60	4.05	5.70	4.48	0.44	0.68	0.96	0.75
2 Pertambangan	(0.98)	0.13	1.14	(1.47)	-0.47	0.06	0.50	-0.67
3 Industri Pengolahan	3.14	5.86	8.46	6.97	0.36	0.68	0.98	0.80
B. Sektor Non Tradables	13.37	2.88	4.84	6.57	3.20	0.78	1.33	1.72
4 Listrik, Gas dan Air	3.64	2.01	3.28	3.82	0.01	0.00	0.01	0.01
5 Bangunan	14.13	3.68	7.97	6.68	0.55	0.16	0.36	0.28
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	16.02	0.11	2.23	5.62	1.55	0.01	0.26	0.61
7 Pengangkutan dan Komunikasi	12.03	3.99	4.94	7.84	0.39	0.15	0.18	0.28
8 Keuangan dan Jasa Perusahaan	14.21	5.31	4.76	8.21	0.21	0.09	0.08	0.13
9 Jasa-jasa	9.12	6.33	7.58	7.16	0.50	0.37	0.45	0.41
Total	3.54	2.20	3.77	2.61	3.54	2.20	3.77	2.61

Sumber : BPS Provinsi Riau
Keterangan : ***(data sangat sementara), (r) revisi

Tabel 5.11 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Tanpa Migas (yoy,%)

Keterangan	2012***	2013 (r)		2013	Sumbangan (%)			
		III***	IV***		2012	III-13	IV-13	2013
A. Sektor Tradables	3.00	4.98	7.20	5.69	1.59	2.49	3.57	2.89
1 Pertanian	2.60	4.05	5.70	4.48	0.86	1.26	1.76	1.42
2 Pertambangan	7.21	3.34	2.90	4.50	0.15	0.07	0.06	0.09
3 Industri Pengolahan	3.27	6.87	10.49	8.08	0.58	1.17	1.76	1.38
B. Sektor Non Tradables	13.37	2.88	4.84	6.57	6.27	1.44	2.44	3.24
4 Listrik, Gas dan Air	3.64	2.01	3.28	3.82	0.02	0.01	0.01	0.02
5 Bangunan	14.13	3.68	7.97	6.68	1.07	0.29	0.65	0.53
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	16.02	0.11	2.23	5.62	3.03	0.02	0.47	1.14
7 Pengangkutan dan Komunikasi	12.03	3.99	4.94	7.84	0.77	0.27	0.33	0.52
8 Keuangan dan Jasa Perusahaan	14.21	5.31	4.76	8.21	0.41	0.16	0.15	0.25
9 Jasa-jasa	9.12	6.33	7.58	7.16	0.97	0.68	0.82	0.77
Non Migas	7.86	3.93	6.01	6.13	7.86	3.93	6.01	6.13

Sumber : BPS Provinsi Riau
Keterangan : ***(data sangat sementara), (r) revisi

Pertumbuhan sektor pertanian Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan yaitu dari 4,05% (yoy) menjadi 5,70% (yoy). Peningkatan diperkirakan bersumber dari meningkatnya produksi sub sektor tanaman perkebunan yang berasal dari panen tanaman kelapa sawit yang berlangsung selama

triwulan laporan. Berdasarkan informasi liason kepada pelaku usaha, diketahui umumnya kenaikan produksi tanaman kelapa sawit terjadi pada bulan Oktober hingga Januari sejalan dengan siklus panen tanaman kelapa sawit.

Tabel 5.12 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Dengan Migas (yoy,%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	Sumber Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	3,48	3,82	4,40	6,34	1,49
Pertambangan dan Penggalian	4,10	3,11	(1,43)	(4,44)	(5,47)	(1,54)
Industri Pengolahan	3,89	8,47	8,83	6,95	5,63	1,50
Pengadaan Listrik dan Gas	2,28	6,49	5,32	3,11	6,05	0,00
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,14	1,21	0,87	0,64	1,06	0,00
Konstruksi (LHS)	7,74	10,49	3,70	2,65	8,49	0,58
Perdagangan	7,48	7,48	10,98	5,59	3,23	0,27
Transportasi dan Pergudangan	7,50	7,10	11,19	6,76	7,99	0,06
Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	8,71	9,38	10,38	5,93	6,97	0,03
Informasi dan Komunikasi	15,05	8,06	15,71	10,91	5,64	0,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	8,93	13,45	10,33	4,70	0,04
Real Estate	8,48	7,36	7,64	6,63	5,32	0,04
Jasa Perusahaan	8,73	8,33	11,53	8,94	12,84	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	8,48	8,21	3,06	1,53	0,03
Jasa Pendidikan	3,12	2,87	4,34	4,15	4,60	0,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,43	8,59	9,19	8,51	8,40	0,01
Jasa lainnya	9,14	9,36	9,48	9,30	11,14	0,04
PDRB	4,94	5,57	3,78	2,49	2,62	2,62

Sumber: BPS, diolah
Keterangan: *) Data sangat sementara

Tabel 5.13 Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulanan Sisi Sektoral (yoy,%)

Uraian	Tw I 2014	Tw II 2014	Tw III 2014	Tw IV 2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,7	7,5	4,5	5,3
Pertambangan dan Penggalian	(4,1)	(6,0)	(5,4)	(6,4)
Industri Pengolahan	6,8	6,6	6,8	2,4
Pengadaan Listrik dan Gas	(0,6)	1,1	4,9	18,9
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,3	0,3	1,4	0,2
Konstruksi (LHS)	10,4	9,3	7,6	6,8
Perdagangan	4,6	2,5	4,6	1,3
Transportasi dan Pergudangan	8,0	8,5	7,5	7,9
Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	3,8	9,2	10,3	4,6
Informasi dan Komunikasi	3,7	4,7	7,3	6,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,5	4,8	3,8	6,7
Real Estate	5,2	5,8	6,2	4,2
Jasa Perusahaan	11,3	14,7	11,7	13,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,4	(2,7)	(0,1)	4,5
Jasa Pendidikan	3,7	1,0	6,2	7,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,7	10,7	8,0	4,8
Jasa lainnya	12,6	12,1	11,3	8,8
PDRB	3,9	2,9	2,7	1,0

Sumber: BPS, diolah
Keterangan: *) Data sangat sementara

Pertumbuhan sektor pertanian Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan yaitu dari 4,5% (yoy) menjadi 5,3% (yoy). Peningkatan sektor ini juga terjadi secara tahunan, yaitu sebesar 4,40% (yoy) pada tahun 2013 menjadi 6,34% (yoy) pada tahun 2014. Peningkatan bersumber dari meningkatnya produksi sub sektor tanaman perkebunan yang berasal dari panen tanaman kelapa sawit yang berlangsung selama triwulan laporan. Pada triwulan IV 2014, pertumbuhan hasil tanaman perkebunan tercatat sebesar 8,48% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,63% (yoy).

Kondisi ini diperkirakan karena faktor curah hujan yang cukup dan mendukung produktivitas pada triwulan laporan. Selain itu, survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengkonfirmasi indikasi peningkatan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu dari 0,81% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,63% pada triwulan laporan.

Kinerja sektor utama perekonomian Provinsi Riau pada triwulan IV 2015 secara umum menunjukkan peningkatan positif, berbeda arah dengan kontraksi pertumbuhan di tiga triwulan awal tahun 2015. Peningkatan kinerja terjadi dari tiga sektor utama yaitu perbaikan kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian, dan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor industri pengolahan.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada beberapa sektor tersier yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sisi lain, pelambatan kinerja sektor konstruksi dan sebagian besar sektor jasa menahan laju peningkatan perekonomian Riau pada triwulan IV 2015

Tabel 5.14 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Dengan Migas (yoy,%)

Uraian	Growth (% yoy)						Kontribusi Pertumbuhan (%)	
	2014	2015				2015	2015	2015
		I	II	III	IV		IV	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.21	7.28	-4.54	-7.62	8.24	0.35	1.85	0.08
Pertambangan dan Penggalian	-5.28	-8.43	-7.62	-6.07	-5.50	-6.91	-1.64	-2.12
Industri Pengolahan	5.63	-0.48	0.94	4.28	9.58	3.61	2.32	0.86
Pengadaan Listrik, Gas	6.81	8.32	8.67	8.51	1.18	6.43	0.00	0.00
Pengadaan Air	1.06	-2.90	3.10	2.55	7.01	2.41	0.00	0.00
Konstruksi	8.46	4.59	5.07	8.06	7.69	6.39	0.63	0.51
Perdagangan Besar, Eceran, Rep. Mobil Motor	3.82	1.36	0.57	0.58	3.97	1.63	0.36	0.14
Transportasi dan Pergudangan	7.99	4.29	4.58	5.69	6.85	5.38	0.05	0.04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.97	1.08	-2.17	-0.03	8.75	1.89	0.05	0.01
Informasi dan Komunikasi	5.64	8.88	7.70	5.26	6.90	7.15	0.04	0.04
Jasa Keuangan	4.93	5.84	-3.44	-0.11	-0.69	0.35	-0.01	0.00
Real Estate	5.32	7.04	7.91	8.38	9.98	8.34	0.08	0.07
Jasa Perusahaan	12.84	6.98	7.09	8.31	8.25	7.67	0.00	0.00
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos.	1.53	1.38	6.08	5.92	4.21	4.39	0.07	0.07
Jasa Pendidikan	5.90	6.29	6.47	8.91	3.94	6.35	0.02	0.03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.40	11.68	8.92	11.06	8.26	9.94	0.02	0.02
Jasa lainnya	11.14	8.41	9.55	11.20	11.24	10.14	0.05	0.04
PDRB	2.70	-0.01	-2.13	-1.38	4.45	0.22	4.45	0.22
PDRB Tanpa Migas	5.92	2.83	-0.57	-0.28	6.20	2.01	6.20	2.01

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Provinsi Riau pada triwulan IV 2015 masih tercatat mengalami pertumbuhan positif 8,24% (yoy) lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,26%.

Peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja

subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian yang tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,88% (yoy) dari kontraksi sebesar 9,49% (yoy) di triwulan sebelumnya.

Peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian diperkirakan akibat peningkatan kinerja subsektor perkebunan. Berdasarkan informasi dari *contact liaison*, adanya kabut asap yang melanda Provinsi Riau pada akhir triwulan III dan awal triwulan IV menyebabkan kegiatan panen kelapa sawit bergeser karena terkendala dan baru dapat dioptimalkan di triwulan IV 2015.

Selain itu, faktor positif yang mendorong pertumbuhan subsektor perkebunan adalah *replanting* yang

dilaksanakan empat tahun yang lalu sudah mulai berproduksi, serta kinerja subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian juga diperkirakan didukung oleh faktor cuaca mulai memasuki musim hujan di provinsi Riau pada pertengahan triwulan laporan.

Pada tabel diatas bahwa produksi terbesar dihasilkan oleh Kelapa Sawit dengan angka yang paling besar dari jenis tanaman lainnya. Menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan tanaman Karet dan Sagu, juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tanaman-tanaman perkebunan diatas sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau.

Tabel 5.15 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman 2010-2014 (Ton)

Jenis Tanaman <i>Crops</i>	2010	2011 ^f	2012 ^f	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Karet <i>Rubber</i>	336.670	333.069	350.476	354.257	367.261
2. Kelapa <i>Coconut</i>	495.306	481.087	473.221	427.080	421.654
3. Kelapa sawit <i>Palm oil</i>	6.293.542	7.047.221	7.343.498	7.570.854	7.761.293
4. Kopi <i>Coffee</i>	1.416	1.913	2.520	2.603	2.465
5. Cengkeh <i>Clove</i>	-	-	-	-	-
6. Pinang <i>Areca nut</i>	9.402	10.700	10.817	8.762	8.597
7. Enau <i>Arenga Saccharifera</i>	24	11	19	22	22
8. Lada <i>Pepper</i>	9	3	1	1	1
9. Gambir <i>Gambir</i>	4.564	4.312	4.230	4.145	4.022
10. Kakao <i>Cocoa</i>	3.321	3.544	3.505	1.552	1.437
11. Kemiri <i>Kemiri</i>	1	-	-	-	-
12. Cusiavera <i>Area Nut</i>	-	-	-	-	-
13. Sagu	291.665	284.319	281.704	126.145	340.196
14. Jambu Mete	-	-	-	-	-
15. Kapuk <i>Ceiba P</i>	-	-	-	-	-
16. Tebu <i>Sugar cane</i>	-	-	-	-	-
17. Jahe	-	-	-	-	-
18. Lain-Lain	-	-	-	-	-

Sumber : Riau Dalam Angka 2015

d. Tanaman Pangan

Tabel 5.16 Produksi Tanaman Sayur-sayuran Menurut Jenis 2010-2014 (Ton)

Jenis Tanaman <i>Crops</i>	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Cabe <i>Chilly</i>	11.941	15.832	15.906	15.509	15.608
2. Ketimun <i>Cucumber</i>	15.774	15.667	13.545	20.726	19.332
3. Terong <i>Eggplants</i>	14.170	14.424	13.861	17.257	14.883
4. Kacang Panjang <i>Yardlong beans</i>	11.056	12.827	11.573	12.447	12.787
5. Bayam <i>Spinach</i>	4.944	6.463	7.804	8.381	7.984
6. Kangkung <i>Swamp cabbage</i>	9.716	10.155	12.556	13.955	13.884
7. Petsai dan Sawi <i>Brasica Rugosa</i>	2.964	2.424	3.266	3.484	3.190
8. Labu <i>Pumpkin</i>	671	333	251	515	522
9. Lainnya <i>Other</i>	2.937	3.198	4.747	8.973	577

Sumber : Riau Dalam Angka 2015

Salah satu sub-sektor dari pertanian adalah pertanian tanaman pangan. Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu penunjang kontribusi dan laju pertumbuhan dari sektor pertanian. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanman pangan sayur-sayuran menurut jenis dari tahun 2010 hingga

2014 menunjukkan angka-angka yang cukup besar. Seperti yang dihasilkan oleh Cabe, Ketimun, Terong dan Kacang Panjang yaitu berkisaran antara belasan ribu hingga puluhan ribu Ton. Terlihat adanya peningkatan yang baik dari tahun ke tahun berikutnya.

Tabel 5.17 Produksi Buah-buahn Menurut Jenis 2010-2014 (Ton)

Jenis Tanaman <i>Crops</i>	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pisang <i>Banana</i>	25.243	26.498	20.644	19.685	22.758
2. Durian <i>Durian</i>	2.374	11.787	13.250	7.951	10.201
3. Duku/Langsat <i>Domesticum</i>	677	2.029	3.383	2.645	2.372
4. Mangga <i>Mangos</i>	5.341	6.005	7.337	6.210	9.785
5. Jeruk <i>Orange</i>	11.138	4.586	5.057	5.195	7.249
6. Rambutan <i>Rambotan</i>	5.361	10.381	9.223	7.604	9.839
7. Pepaya <i>Papaya</i>	7.570	7.391	12.965	19.517	7.379
8. Nenas <i>Pineapple</i>	19.837	109.374	92.444	96.173	107.438
9. Jambu <i>Guavas</i>	4.600	4.215	3.783	3.882	3.407
10. Buah Lainnya <i>Other</i>	22.305	23.282	20.788	21.069	25.621

Sumber : Riau Dalam Angka 2015

Selain sayur-sayuran, buah-buahan juga termasuk pada sub-sektor pertanian tanaman pangan memberikan pengaruh terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Riau. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa buah Nanas memberikan angka produksi yang paling besar

setiap tahunnya yaitu dari kisaran belasan ribu hingga ratusan ribu Ton. Jenis buah-buahan yang juga memiliki angka yang cukup besar adalah buah Pisang, buah Durian, buah Mangga, buah Rambutan dan buah lainnya.

e. Peternakan

Tabel 5.18 Produksi Daging Menurut Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota 2014 (Kg)

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Jenis Ternak <i>Kind of Cattle</i>				
	Sapi <i>Cow</i>	Kerbau <i>Bufallo</i>	Kambing <i>Goat</i>	Domba <i>Sheep</i>	Babi <i>Pig</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kuantan Singingi	435.661	223.694	26.888	-	-
02. Indragiri Hulu	660.382	6.314	7.950	-	17.361
03. Indragiri Hilir	406.000	-	25.288	1.148	-
04. Pelalawan	411.264	39.286	64.505	475	39.273
05. Siak	1.300.096	45.817	172.577	5.586	12.932
06. Kampar	1.589.830	1.228.316	67.022	827	32.191
07. Rokan Hulu	858.890	109.914	69.340	5.426	1.165.499
08. Bengkalis	218.216	16.948	4.503	-	66.593
09. Rokan Hilir	342.816	5.787	3.574	-	371.129
10. Kepulauan Meranti	30.626	-	4.378	-	290.880
71. Pekanbaru	2.880.777	163.126	171.774	-	104.709
73. Dumai	163.060	474	2.543	-	27.360
Jumlah/Total 2014	9.297.618	1.839.676	620.342	13.462	2.127.927
2013	8.242.781	1.367.217	550.139	10.174	821.786
2012	11.317.359	1.607.797	465.571	6.386	831.267
2011	8.773.682	1.021.748	446.970	4.268	1.081.370
2010	7.478.418	1.359.282	490.123	8.739	985.881
2009	7.639.840	1.272.606	1.192.510	9.536	662.819

Sumber : Riau Dalam Angka 2015

Peternakan merupakan sub-sektor dari sektor pertanian yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi daging ternak di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Produksi daging ternak Kerbau terus meningkat dari tahun 2009

hingga 2014 yaitu 1.839.676 Kg di tahun 2014. Produksi daging ternak Sapi juga memberikan angka yang besar hingga 9.297.618 Kg pada tahun 2014. Produksi daging ternak lainnya yang juga memberikan angka yang besar adalah produksi daging ternak Kambing, Domba dan Babi.

Tabel 5.19 Produksi Daging dan Telur Ternak Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota 2014 (Kg)

Kabupaten/Kota Regency/City	Ayam Ras Petelur Layer		Ayam Kampung Domestic Hens		Itik Duck	
	Daging Meat (Kg)	Telur Egg (Kg)	Daging Meat (Kg)	Telur Egg (Kg)	Daging Meat (Kg)	Telur Egg (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kuantan Singingi	667.404	-	217.066	127.490	20.969	158.897
02. Indragiri Hulu	4.623.733	-	7.296	57.151	10.568	143.936
03. Indragiri Hilir	273.679	-	965.636	455.469	49.001	181.681
04. Pelalawan	4.467.460	-	303.283	134.374	75.118	224.448
05. Siak	1.452.182	-	399.578	54.492	3.042	179.917
06. Kampar	2.067.337	864.697	395.340	234.206	35.943	257.362
07. Rokan Hulu	4.521.076	-	816.742	236.903	21.104	214.104
08. Bengkalis	2.536.413	-	207.142	64.146	29.499	127.827
09. Rokan Hilir	237.057	101.031	213.059	70.280	11.408	218.978
10. Kepulauan Meranti	297.078	53.424	52.212	33.777	1.857	25.342
71. Pekanbaru	17.728.009	-	442.447	92.286	14.600	31.722
73. Dumai	1.860.158	-	24.195	3.429	9.393	13.559
Jumlah/Total						
2014	40.731.586	1.019.152	4.043.996	1.564.003	282.502	1.777.773
2013	26.609.747	1.843.781	3.302.202	1.494.195	245.625	1.794.194
2012	37.034.456	2.021.545	2.702.121	1.643.312	231.651	2.097.165
2011	25.618.229	1.330.650	1.255.545	1.129.561	245.886	1.701.276
2010	25.209.624	2.765.053	1.780.741	1.801.106	262.924	1.609.986
2009	29.901.246	5.049.441	1.656.175	1.380.273	216.336	1.958.516

Sumber : Riau dalam Angka 2015

Peternakan merupakan sub-sektor dari sektor pertanian yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi daging dan telur ternak unggas di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Produksi daging Ayam Ras Petelur terbesar adalah pada tahun 2014 yaitu 40.731.586 Kg

daging. Produksi terbesar Ayam Kampung terdapat pada pada tahun 2014 yaitu 4.043.996 Kg daging dan 1.564.003 Kg telur. Produksi terbesar Itik terdapat pada tahun 2014 yaitu 282.502 Kg daging. Pertumbuhan yang meningkat tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kinerja sub-sektor Peternakan terhadap sektor Pertanian Provinsi Riau.

f. Perikanan

Tabel 5.20 Nilai Produksi Menurut Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya 2009-2014 (Ribu Rupiah)

Tahun Year	Perikanan Laut Sea Fishery	Perairan Umum Open Water	Budidaya Cultivated	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	2.408.571.341	762.638.351	1589.543.986	4.760.753.678
2013	1.926.897.450	655.462.987	1.880.144.120	4.462.504.557
2012	1.360.193.081	544.185.353	1.188.242.729	3.092.621.163
2011	986.879.050	439.920.881	1.794.173.571	3.220.973.502
2010	942.078.850	362.753.850	664.949.632	1.969.782.332
2009	899.451.600	344.422.800	502.532.613	1.746.407.013

Sumber : Riau Dalam Angka 2015

Perikanan merupakan sub-sektor dari sektor pertanian yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian di Provinsi Riau. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produksi perikanan di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Nilai produksi terbesar Perikanan Laut terdapat pada tahun 2014 yaitu Rp. 2.408.571.341,-. Nilai produksi terbesar Perairan Umum terdapat pada tahun 2014 yaitu Rp. 762.638.351,-. Nilai produksi terbesar Budidaya terdapat pada tahun 2013 yaitu Rp. 1.880.144.120,- dan jumlah terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu dengan total Rp. 4.760.753.678,-. Pertumbuhan yang meningkat tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kinerja sub-sektor Perikanan terhadap sektor Pertanian Provinsi Riau.

KESIMPULAN

1. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Riau.
2. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB nasional berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia.
3. Pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDRB di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang positif.
4. Pertumbuhan sektor ekonomi terhadap PDB nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, R., 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arsyad, L., 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Bank Indonesia Provinsi Riau, 2015. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional*. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2015. *Riau Dalam Angka*. BPS Riau.
- Marhamah., 2000. *Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Propinsi Sumatera Utara*. Tesis S-2 MEP UGM. Yogyakarta. (*unpublished*).
- Miroah, C., 2015. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.
- Mualif, E., 2010. *Pengembangan Sektor Pertaniandi Kota Salatiga Dengan Pendekatan Tipologi Klassen*. Skripsi S-1 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Nazir, M., 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Richardson, HW., 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES. Jakarta.
- Surakhmad, Winarno., 2001. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Suyuti, I., 2000. *Pengembangan Sektor Ekonomi yang Potensial Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang*. Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. (*unpublished*).
- Tampilang, M, Wauran, P.K.R., 2014. *Analisis Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Kepulauan Taulud*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Tarigan, R., 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Utami, P.N., 2010. *Kontribusi Sektor Bangunan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi Riau*. Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

Wiryamarta, F., 2009. Kinerja Sektor Pertanian di Propinsi Riau Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Tesis S-2 Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Bank Indonesia, 2016. *Kajian Ekonomi Regional*.
[www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-](http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/riau/Default.aspx)

[ekonomi-regional/riau/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/riau/Default.aspx).
Diunduh Juli 2016.

Badan Pusat Statistik, 2016. *Produk Domestik Bruto*

www.bps.go.id/Subjek/view/id/11#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1. Diunduh Juli 2016.